

## KEBIJAKAN DAN UPAYA MITIGASI MALAYSIA DALAM MENGATASI ANCAMAN DI LAUT CHINA SELATAN

Oleh:

**Sartono**

Strategi Pertahanan Laut Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan  
p.sartono@gmail.com

### Abstrak

Perkembangan terkini di kawasan Indo Pasifik telah menunjukkan sejumlah tantangan dan ketidakpastian baru yang berdampak pada pertahanan nasional Malaysia. Sementara Malaysia dan kawasan secara umum mengalami stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, isu-isu terkini khususnya isu keamanan non-konvensional mulai membentuk dan mempengaruhi sifat ancaman terhadap pertahanan dan keamanan nasional. Penelitian ini merupakan penelitian literatur untuk mengetahui bagaimana upaya Malaysia dalam mengurangi kemungkinan konfrontasi militer pada konflik wilayah di Laut China Selatan yang semakin memanas akibat upaya militerisasi China. Kajian ini menunjukkan bahwa Malaysia menyadari atribut dari paradigma ini, yaitu sebuah desakan untuk tidak memihak, adopsi bersamaan dari pertahanan terbuka dan pembangkangan secara tidak langsung, upaya aktif untuk memupuk posisi mundur. Malaysia melalui kebijakan lindung nilai terus berusaha memelihara hubungan persahabatan dengan semua negara dan mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan hukum internasional. Malaysia berpendapat Laut China Selatan harus menjadi *platform* kerjasama dan konektivitas, bukan area konfrontasi atau konflik, ini sejalan dengan semangat *Zone of Peace, Freedom and Neutrality* (ZOPFAN). ZOPFAN bertujuan untuk mengurangi berbagai risiko yang dipimpin oleh ketidakpastian komitmen AS, niat jangka panjang China, dan hubungan masa depan Malaysia dengan kedua negara tersebut.

**Kata Kunci:** Strategi Malaysia, Maritim, Laut China Selatan, Konflik, Mitigasi

### 1. PENDAHULUAN

Geografi Malaysia adalah relatif kecil dengan dua wilayah di Semenanjung Malaysia, dan Sabah dan Sarawak, wilayah di antara Samudra Pasifik dan Hindia yang luas, lokasi dan sumber daya alam Malaysia yang strategis menjadi berkah sekaligus tantangan. Visi nasional Malaysia memungkinkin Pemerintah untuk mengejar tiga hasil yang diinginkan, yaitu: legitimasi, akseptabilitas, dan keandalan. Untuk jangka panjang, posisi Malaysia sebagai negara maritim dengan akar kontinental, dan memaksimalkan potensinya sebagai *bridging linchpin* antara kawasan Asia-Pasifik dan Samudra Hindia (Ahmad, 2019a).

Malaysia adalah salah satu dari beberapa negara di Asia Tenggara yang memiliki klaim unilateral di sebagian wilayah dari kawasan Laut China Selatan yang diklaim Republik Rakyat China. Dalam hal ini, Malaysia memilih untuk menjauhi perselisihan dan berupaya melanjutkan hubungan positif dalam bidang ekonomi dengan China. Namun demikian, beberapa tahun terakhir Malaysia juga berupaya meningkatkan hubungan politik dan militernya dengan Amerika Serikat (AS), disamping keduanya pun telah lama menikmati hubungan ekonomi yang kuat. Melalui kebijakan ini, Malaysia berusaha mencari keseimbangan diantara dua kekuatan adidaya dunia, yang pada satu sisi meningkatkan hubungan ekonomi dengan China untuk mengurangi ketergantungan ekonomi Malaysia pada AS, sedang peningkatan hubungan politik dan

militer yang lebih kuat dengan AS adalah untuk membantu melindungi Malaysia dari hegemoni China di kawasan Asia Tenggara (Finkbeiner, 2013).

Laut China Selatan yang kaya sumber daya alam merupakan wilayah maritim yang penting bagi Malaysia. Selain menjadi penghubung rute pelayaran utama perdagangan dunia antara timur dan barat, Malaysia juga salah satu negara pengklaim Laut China Selatan. Pemerintah Malaysia bagaimana pun juga menghadapi ketidaksesuaian yang berkembang antara kemampuan angkatan bersenjata dan kepentingannya dalam mengatasi tantangan maritim di Laut China Selatan. Dalam sebuah catatan untuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Malaysia menyatakan penolakannya atas klaim China terhadap hak bersejarah, atau hak kedaulatan atau yurisdiksi lainnya, sehubungan dengan wilayah maritim Laut China Selatan yang dicakup dalam klaim unilateral '*nine dash line*' China (Parameswaran, 2015). Ini bukan pertama kalinya Malaysia mengeluarkan pernyataan seperti itu tentang Laut China Selatan kepada PBB. Pada Desember 2019, Malaysia telah mengirim catatan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang mengatakan bahwa Malaysia bermaksud mengklaim wilayah laut di luar landas kontinen di luar 200 mil laut dari garis dasar Malaysia. Mengikuti negara-negara regional lainnya, seperti China, Vietnam, dan Indonesia, yang juga telah mengeluarkan pernyataannya ke PBB tentang Laut China Selatan. Klaim ini juga menjadi upaya dan pernyataan sikap tegas Malaysia untuk menolak

klaim oleh negara lain, langkah ini tidaklah mengejutkan dan tidak juga berdampak signifikan terhadap masalah Laut China Selatan (Yuanzhi, 2020).

Tindakan Malaysia terkait dengan perubahan kebijakannya di Laut China Selatan selama beberapa tahun terakhir terlihat tidak menonjolkan diri dan lebih mengadopsi pendekatan yang relatif pragmatis dalam sengketa Laut China Selatan. Malaysia lebih mementingkan eksplorasi minyak dan kerja sama menyeluruh dengan China. Meskipun China tetap menjadi mitra dagang terbesar Malaysia, postur yang terakhir telah berubah sampai pada batasan tertentu. Sehingga Malaysia dalam beberapa tahun terakhir telah beralih dengan menjadi negara yang bersikap "*pragmatis low profile*". Ini menegaskan hak atas eksplorasi minyak dan gas di perairan yang disengketakan dengan China. Kejadian inilah yang kemudian memicu kemarahan China. Dengan menyerahkan notanya ke PBB, Malaysia bermaksud menyatakan kesediaannya untuk mempertahankan hak dan kepentingan maritimnya di kawasan ini.

Sikap Malaysia ini sejalan dengan konsep Amerika Serikat yang sepenuhnya menunjukkan sikap tidak netral atas masalah Laut China Selatan dan mendukung negara-negara Asia Tenggara dalam perselisihan mereka dengan China di kawasan itu. Ini akan mendesak negara-negara Asia Tenggara untuk mengambil tindakan yang lebih ofensif terhadap China atas sengketa Laut China Selatan dan mereka berusaha untuk mendapatkan lebih banyak manfaat darinya. Sebagai tanggapan, China harus lebih banyak melakukan upaya diplomatik untuk menangani hubungannya dengan negara-negara kawasan tersebut.

Tentu saja terkait dengan meningkatnya ketegangan antara China dan AS di Laut China Selatan, para penuntut ini jelas menyadari bahwa konflik militer antara dua negara adidaya di Laut China Selatan akan menimbulkan ancaman besar bagi keamanan mereka sendiri. Negara-negara Asia Tenggara tentu saja tidak ingin melihat konsekuensi seperti itu. Sebagai tanggapan, ASEAN akan mencoba melakukan upaya untuk mendinginkan ketegangan China-AS di kawasan dan menolak melakukan terlalu banyak tindakan ofensif dan radikal terhadap China di bawah pengaruh AS. Untuk langkah penyelesaian menghindari konflik di masa depan, Bagaimana upaya Malaysia dalam mendorong dan mempromosikan hubungan bilateral yang kuat dengan AS dan China, serta mempromosikan hubungan mereka dengan ASEAN, kajian ini antara lain adalah untuk menganalisis keinginan Malaysia dalam penyelesaian konflik mereka dengan China di LCS.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan desain kepustakaan (literatur). Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah metode

penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah, dan peneliti merupakan instrumen utama penelitian, teknik pengambilan data dilakukan secara triangulasi, dengan analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan suatu makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2013). Sedangkan desain kepustakaan atau literatur, merupakan desain penelitian yang mendasarkan pada pendalaman data melalui kajian teoritis dan referensi lainnya yang terkait pada situasi sosial yang sedang diteliti. Penelitian kualitatif, menekankan kenyataan berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu (Siyoto & Sodik, 2015). Penelitian kualitatif lebih banyak digunakan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang obyek yang diteliti.

### Regionalisme Konflik LCS

Dalam menghadapi klaim *nine dash line* China di LCS, Malaysia cenderung mengambil langkah-langkah menghindari konflik langsung dengan China untuk menjaga keamanan dan stabilitas kawasan. Dalam kajian *Regional Security Complex Theory* (RSCT), isu keamanan dan stabilitas kawasan adalah fenomena yang selalu menjadi perhatian, karena setiap kawasan di dunia ini memiliki kondisi yang berbeda-beda. Seperti halnya di Laut China Selatan, kondisi regionalnya masih belum dapat diselesaikan dan bahkan cenderung semakin berkembang untuk menjadi konflik antar kekuatan yang saling berkompetisi akibat adanya kekuatan lain di luar kawasan yang masuk. RSCT mencoba mengembangkan dan menganalisis interaksi antar negara-negara sebagai unit-unit yang saling terhubung satu sama lain di dalam suatu kawasan sebagai bagian dari sistem (Buzan & Waever, 2009). Kawasan ini memuat konteks yang luas, dan dipahami sebagai kesatuan unit berdasarkan jarak atau faktor geografis belaka, dan juga memuat unsur lain yang turut berkontribusi dalam pembentukan identitas unit sebagai satu bagian dari sebuah kawasan (Breslin, 2010). Dalam RSCT, polaritas yang muncul dapat dianalisis dalam level global, regional maupun subregional. Buzan memaparkan bahwa polaritas muncul akibat fenomena pada tiap kawasan, dimana muncul sebuah negara atau kekuatan baru yang dominan didalamnya, namun tidak melampaui kawasan tersebut. Polaritas yang ada memberikan hasil distribusi kekuatan untuk membuat kriteria suatu negara menjadi *super power*, *great power*, *regional power*, maupun *lesser power*.

Dalam sebuah negara, kekuatan merupakan satu variabel penting karena dapat menentukan kemampuan negara tersebut untuk dapat bertahan hidup dalam sistem. Buzan menandai distribusi kekuatan yang tidak berimbang antara negara-negara dalam sebuah kawasan dapat menjadi awal penyebab konflik. Selain itu, identitas negara juga mempengaruhi dinamika yang terjadi di dalam

kawasan, sehingga distribusi kekuatan maupun identitas negara dalam suatu kawasan merupakan hal yang saling berhubungan. Jika distribusi kekuatan di suatu kawasan bersifat unipolar, maka hanya ada satu negara yang beridentitas sebagai *regional power*, demikian pula distribusi kekuatan bipolar dan multipolar, dimana identitas ini menentukan peran yang dapat dimainkan oleh negara tersebut di dalam kawasan (Frazier & Stewart-ingersoll, 2010). Frazier membagi peranan sebuah negara *regional power* dalam tiga, yakni sebagai penyerang (*aggressor*), pelindung (*defender*), dan penyeimbang (*balancer*). Negara *regional power* berperan *aggressor* adalah negara memiliki kebijakan untuk meningkatkan kekuatannya dan mengesampingkan distribusi kekuatan merata untuk menjadi aktor dominan di kawasan. Sementara negara *defender* adalah negara yang kebijakannya cenderung untuk mempertahankan status quo, yang dapat berbentuk interaksi berupa konflik maupun kerja sama. Sedangkan negara *balancer* akan senantiasa mengupayakan keseimbangan kekuatan antara negaranya dengan negara lain di dalam kawasan tersebut agar kondisi *balance of power* dapat tercapai dan stabilitas kawasan dapat terjaga.

Dalam konteks lain, konsep stabilitas kawasan dapat dijelaskan dari aspek hubungan internasional, yaitu sebuah kondisi dimana setiap negara dalam sebuah kawasan memiliki kemampuan untuk menjaga kedaulatan negaranya dan mampu menjamin bahwa seluruh kebutuhannya dapat terpenuhi, dan ketika kondisi berhasil dicapai, suatu negara akan menyesuaikan pola perilaku dan interaksi yang ditunjukkan oleh negara lain. Disamping itu, stabilitas juga dapat dipahami sebagai sebuah kondisi yang bersifat menentang terhadap adanya konflik atau interaksi yang menghasilkan kerugian, baik bagi salah satu maupun semua pihak (Ayson, 2007). Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa stabilitas kawasan merupakan kondisi nyaman yang ingin dicapai oleh negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya.

### 3. DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Ketika isu Laut China Selatan muncul sebagai masalah keamanan yang serius pada akhir 1980-an, Malaysia telah menerapkan kebijakan yang sama hingga saat ini secara konsisten, adapun jika ada perubahan terhadap kebijakan luar negerinya hanya berupa penyesuaian kecil. Pada dasarnya kebijakan luar negeri Malaysia mengandung tiga elemen. Elemen pertama adalah perlindungan terhadap kedaulatan teritorial dan hak berdaulat negara dalam wilayah ZEE Malaysia. Area yang diklaim Malaysia terletak di daerah Sarawak dan Sabah, serta perairan lepas di wilayahnya yang memiliki potensi perikanan dan kandungan hidrokarbon yang signifikan. Terkait dengan potensi sumber energi, hal itu penting bagi Malaysia sebagai sumber pendapatan negara tersebut. Tercatat pada tahun 2019, Malaysia menjadi

produsen gas alam terbesar ketiga di dunia dengan 28,69 juta ton dan produsen minyak mentah terbesar ke-26 dengan 661.240 barel per hari (Muller, 2021).

Elemen kedua adalah penegakan hukum internasional, termasuk kebebasan bernavigasi dan penerbangan. Sebagai negara yang relatif kecil, sikap Malaysia adalah mendukung hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982 yang telah memberikan cukup keuntungan. Sikap ini terlihat dari dukungannya pada Mahkamah Arbitrase Internasional atau *Permanent Court of Arbitration* (PCA) untuk menyelesaikan klaim teritorial dan yurisdiksi yang saling bertentangan, dan telah berpartisipasi dalam penyelesaian tiga kasus besar dengan Indonesia dan Singapura. Contoh lain adalah ketika PCA mengeluarkan putusannya tentang Filipina melawan China pada 12 Juli 2016, setelah itu Malaysia menyatakan bahwa sengketa Laut China Selatan harus diselesaikan secara damai melalui “penghormatan penuh terhadap proses hukum dan diplomatik” termasuk UNCLOS. Sikap Malaysia itu sepenuhnya telah sesuai dengan putusan Arbitrase Internasional yang menyatakan bahwa klaim *nine dash line* China tidak sesuai dengan UNCLOS, sehingga Malaysia tidak mengakui klaim tersebut dan oleh karenanya juga tidak menganggap adanya klaim yang tumpang tindih antara kedua negara (The Straits Times, 2017).

Elemen ketiga adalah upaya Malaysia untuk terus mendorong perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut China Selatan. Sebagai negara yang dilalui oleh jalur perdagangan, kemakmuran ekonomi Malaysia tergantung pada kebebasan pelayaran dan perdagangan yang melintasi Selat Malaka dan Laut China Selatan, karena secara kritis, *sea line of communication* yang melewati Laut China Selatan menghubungkan Semenanjung Malaysia dengan wilayah Timur Malaysia. Oleh karena itu, sebagai negara yang menyadari kekuatan militernya yang masih jauh dibawah China, Malaysia lebih memilih untuk menerapkan kebijakan mengelola (*manage*) hubungan dengan China melalui berbagai bentuk kerjasama, daripada kebijakan membatasi (*containment*) China seperti yang dilakukan beberapa negara anggota ASEAN. Walaupun demikian, sikap terbuka Malaysia tetap ditunjukkan terhadap negara-negara Barat seperti AS dan sekutunya dalam hal kerjasama di berbagai sektor. Dengan sikap netral tersebut, Malaysia berharap agar tercipta kondisi yang stabil di dalam kawasan serta tetap dapat memperoleh keuntungan dari semua pihak yang berkepentingan di Laut China Selatan.

Sejak 2009, China telah mengambil sikap yang lebih tegas dalam perselisihannya dengan lima negara pengklaim lainnya - Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam - atas kedaulatan teritorial dan hak maritim di Laut China Selatan. Selama beberapa tahun terakhir, Beijing telah meningkatkan cakupan dan frekuensi patroli angkatan lautnya dalam klaim sembilan garis putus-

putusnya yang terkenal yang meliputi sebagian besar Laut China Selatan dan memastikan dimulainya pekerjaan reklamasi di Spratly. Tentu saja tindakan China ini telah menimbulkan kekhawatiran di dalam negara-negara ASEAN dan di seluruh Asia-Pasifik, tanggapan oleh negara-negara pengklaim terhadap tindakan China belum seragam. Vietnam dan Filipina secara langsung menghadapi kapal-kapal China dan secara terbuka mengutuk upaya paksa China, sedangkan Malaysia dalam beberapa tahun terakhir terlihat melakukan pendekatan yang pragmatis, lebih tenang dan tidak mencolok (Darmawan & Mahendra, 2018).

Malaysia memiliki beberapa kepentingan di Laut China Selatan. Yang pertama dan tersempit adalah mempertahankan klaim Malaysia. Di Laut China Selatan, Malaysia mengklaim 11 fitur maritim di Kepulauan Spratly dan menempati delapan di antaranya, dengan tiga lainnya diduduki oleh Vietnam atau Filipina. Bagi Malaysia, menjaga klaim tersebut sangat penting untuk kemakmuran dan keamanan Malaysia (Storey, 2020). Negara ini adalah produsen minyak dan gas alam terbesar kedua di Asia Tenggara dan eksportir gas alam cair (LNG) terbesar ketiga di dunia, dengan besar sumber daya minyak dan gasnya sebagian besar dari Laut China Selatan. Sektor minyak dan gas menyumbang sekitar sepertiga pendapatan tahunan pemerintah Malaysia, dan beberapa ladang dan *platform* untuk mengeksploitasi hidrokarbon berada dalam klaim *nine dash line* China. Dari segi keamanan, mencegah perambahan ke bagian Malaysia di Laut China Selatan terkait dengan menjaga kedaulatan dan integritas teritorial negara, terutama karena jalur air tersebut memisahkan Semenanjung Malaysia dari Malaysia Timur.

#### **Kebijakan Maritim Malaysia di LCS**

Malaysia berupaya mendefinisikan kembali strategi untuk meningkatkan kesiapan militer dalam melindungi kepentingan Malaysia sebagai negara yang aman, berdaulat dan sejahtera. Gagasan ini timbul karena dipengaruhi oleh sifat ancaman tradisional dan non-konvensional di teater pertahanan timur dan barat Malaysia; kebersamaan angkatan bersenjata dalam operasi; integrasi dan koordinasi komando dan kontrolnya; interoperabilitas mesinnya; dan, kebutuhan pengetahuan kekuatan masa depan. Dengan demikian, strategi Malaysia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan angkatan bersenjata untuk melindungi integritas teritorial, kedaulatan, dan kesejahteraan ekonomi negara.

Sebagai upaya melindungi dan mempromosikan kepentingan Malaysia yang berlapis-lapis, strategi pertahanan negara dikelompokkan dalam tiga pilar pendekatan kebijakan: pencegahan konsentris, pertahanan komprehensif, dan kemitraan yang kredibel. Unsur-unsur reformasi strategi pertahanan ini dimotivasi oleh aspirasi pemerintah untuk menanamkan tata kelola yang baik dan meningkatkan integritas,

akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan pengadaan pertahanan.

Redefinisi Strategi Malaysia ini memberikan tiga pesan utama, dua pesan ditujukan untuk rakyat Malaysia, dan satu merupakan pesan internasional, yaitu: (a) warga Malaysia dibujuk untuk tidak menganggap remeh keamanan dan stabilitas negara ini. Ini merupakan dorongan kesadaran keamanan dan kesiapan keamanan bagi seluruh bangsa, di mana pemerintahan dan masyarakat harus berbagi tanggung jawab untuk pertahanan nasional; (b) ancaman keamanan Malaysia bersumber dari militer dan non-militer, baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini membawa pendekatan 'seluruh pemerintah' sebagai bagian integral dari strategi keamanan yang efektif, di mana militer dan lembaga non-militer secara terpadu bekerja sama dalam membela Malaysia; dan (c) Malaysia bertekad untuk membela kepentingan nasionalnya melalui prinsip-prinsip non-blok, kerja sama inklusif, dan keamanan bersama (Ahmad, 2019b).

Mendasarkan pada konsep strategi diatas, maka Malaysia memiliki kepentingan untuk terus mempertahankan hubungan bilateral yang kuat dengan China di luar masalah Laut China Selatan. Hubungan Tiongkok-Malaysia cukup erat sejak berakhirnya era Perang Dingin, dengan ketegangan atas pertanyaan ideologis dan etnis Tionghoa mereda dan kedua negara telah meningkatkan hubungan ekonomi. Secara simbolis, Malaysia adalah negara ASEAN pertama yang menormalkan hubungan dengan China, diinisiasi oleh PM Tun Abdul Razak pada tahun 1974. Peristiwa ini menandai berbagai gagasan tentang hubungan khusus antara kedua negara yang terus mengemuka di kalangan resmi. Saat ini, China juga merupakan mitra dagang terbesar Malaysia dan pasar penghasil turis terbesar di luar ASEAN. Itu berarti Beijing dapat menjadi pusat tujuan Pemerintah Malaysia untuk menjadi salah satu negara berpenghasilan tinggi dan negara maju di kawasan Asia Tenggara pada masa mendatang.

Kepentingan Malaysia lainnya di Laut China Selatan adalah memastikan perdamaian dan stabilitas regional yang lebih luas dan kebersamaan yang terbuka. Laut China Selatan sarana utama perdagangan, pengiriman dan telekomunikasi lewat laut yang dilalui oleh sepertiga armada perdagangan dunia. Hal ini membuat perdagangan bebas, jalur komunikasi laut yang aman dan terjamin (SLOCs), dan tatanan regional secara keseluruhan menjadi sangat penting bagi negara perdagangan dan maritim seperti Malaysia, di mana rasio perdagangan terhadap produk domestik bruto (PDB) melebihi 150 persen dan di mana sekitar 95 persen perdagangan dilakukan melalui laut (Parameswaran, 2015).

Malaysia di Laut China Selatan juga memiliki kepentingan pelestarian norma-norma global dan hukum internasional. Ini termasuk prinsip-prinsip umum seperti penyelesaian sengketa secara damai dan kesepakatan khusus yang berlaku untuk masalah

Laut China Selatan, seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982). Dalam pandangan Malaysia, hukum dan norma di Laut China Selatan membantunya dan pengklaim lainnya mencari kejelasan dalam menghadapi klaim yang saling bertentangan dari dasar pemahaman bersama tanpa menggunakan pendekatan “yang paling mungkin benar” dan tindakan destabilisasi wilayah yang melibatkan kekuatan militer.

#### **Pendekatan Aman Malaysia Sebagai Kontinuitas dan Perubahan**

Malaysia dalam beberapa tahun terakhir ini untuk melindungi berbagai kepentingannya telah berupaya menggunakan pendekatan lindung nilai yang cenderung aman bagi negara itu. Strategi lindung nilai merupakan suatu strategi yang bertujuan mengurangi dampak risiko dari aktifitas negara yang tidak terduga, di samping tetap memungkinkan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktifitas tersebut. Dalam hal ini, pemerintah Malaysia berupaya menggunakan kombinasi pendekatan diplomatik, hukum, keamanan, dan ekonomi untuk mengamankan klaimnya di Laut China Selatan, sekaligus menunjukkan keinginannya untuk mempertahankan hubungan khususnya dengan China. Sementara ketegasan China yang terus berkembang telah membuat Malaysia harus mengkalibrasi ulang pandangannya di beberapa kepentingannya dan komponen pendekatan.

a. Pendekatan Diplomasi. Secara diplomatis, sejak 2009 Malaysia telah bermain aman dengan secara cerdas mengelola hubungan istimewanya dengan China secara bilateral sekaligus menggunakan norma dan mekanisme regional untuk mengamankan kepentingannya. Di satu sisi, Malaysia dalam menganggapi insiden di Laut China Selatan yang melibatkan China dikontrol dengan ketat dan sering dikomunikasikan secara pribadi ke Beijing, karena diyakini bahwa meningkatnya nasionalisme di kalangan publik dapat membatasi pilihan pemerintah dan berisiko merusak hubungan vital. Beijing pada gilirannya secara pribadi dan publik menghargai pendekatan pemerintah Malaysia yang lebih tenang untuk menangani masalah ini dan sebagai hasilnya telah memperlakukannya jauh lebih lembut dibandingkan dengan Vietnam dan Filipina di Laut China Selatan. Di sisi lainnya, Malaysia telah berupaya memastikan ASEAN mempertahankan tingkat persatuan dasar pada masalah Laut China Selatan, sehingga dapat berbicara menentang perubahan sepihak terhadap status quo oleh para aktor, termasuk China. Malaysia juga memulai pembicaraan dengan sesama negara pengklaim di ASEAN untuk mempersempit perbedaan di Laut China Selatan dan berpotensi membantu memajukan kemajuan *Code of Conduct* (CoC), meskipun diskusi ini dikatakan berada pada tahap yang sangat awal. Meskipun ada cukup alasan untuk percaya bahwa

bahkan COC mungkin tidak cukup untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan, apalagi menyelesaikan perselisihan (Manurung, 2017).

b. Pendekatan Hukum. Malaysia juga telah mencoba bermain aman dalam pendekatan hukum, dengan hati-hati dan selektif menggunakan lembaga internasional untuk mengamankan klaimnya dan mempersempit perbedaan dengan sesama negara klaim di ASEAN bila perlu, tetapi menolak untuk mendukung upaya yang lebih kontroversial oleh pihak lain karena takut membuat marah Beijing dan merusak kepentingan Malaysia sendiri.

Kehati-hatian Pemerintah Malaysia dapat dipahami untuk menjaga hubungan Tiongkok-Malaysia, meskipun ketegasan Beijing semakin meningkat di Laut China Selatan. Bagi Pemerintah Malaysia menjaga hubungan baik dengan Beijing adalah menjaga hubungan perekonomian yang semakin berkembang baik. Ini pentingnya, karena hubungan baik Tiongkok-Malaysia akan membuat Beijing memperlakukan Malaysia dalam masalah Laut China Selatan relatif lebih baik daripada perlakuan Beijing terhadap Filipina dan Vietnam.

c. Pendekatan Keamanan. Malaysia terus memperkuat kemampuan lembaga-lembaga pertahanannya, terutama Angkatan Laut Kerajaan Malaysia (RMN), Angkatan Udara Kerajaan Malaysia (RMAF) dan Badan Penegakan Maritim Malaysia (MMEA) untuk mengamankan klaimnya di Laut China Selatan dan sumber daya di dalamnya. Namun langkah-langkah yang dirancang dalam penguatan kemampuan pertahanan lautnya adalah untuk mencegah potensi eskalasi dengan China di Laut China Selatan. Ini terus berlanjut di tengah meningkatnya pelanggaran kapal-kapal China ke perairan Malaysia, sejak 2008 hingga 2012 sebanyak 35 aset milik PLA Navy dan *China Coast Guard* (CCG) yang diamati di ZEE Malaysia di wilayah Kepulauan Spratly.

Di satu sisi, Malaysia secara aktif meningkatkan kemampuannya di laut, tahun 2013 dan 2014 seiring dengan meningkatnya pelanggaran China di wilayah ZEE Malaysia. Secara tradisional, untuk melindungi klaimnya, dengan mempertahankan beberapa pos militer di Kepulauan Spratly, patroli laut dengan kapal perang dan kapal selam di ZEE dan daerah sengketa untuk memantau dan membayangi kapal asing, jika diperlukan, menggunakan prosedur standar, dan melakukan latihan secara berkala di atau dekat wilayahnya di Laut China Selatan untuk menegaskan kembali kehadirannya di wilayah sengketa dan menguji kesiapan operasionalnya. Dalam menanggapi pelanggaran kapal China yang semakin berani ke perairan Malaysia, RMN telah meningkatkan patroli di sekitar fitur yang diduduki dan diklaim dan diam-

diam meningkatkan kerja sama intelijen dengan mitra seperti Amerika Serikat dalam domain maritim.

Sementara kapal-kapal Malaysia membayangi kapal-kapal China ketika mereka melanggar perairan Malaysia, pihak Malaysia cenderung mengeluarkan perintah bagi kapal-kapal China untuk pergi tetapi menghindari melakukan manuver agresif, sejalan dengan preferensi untuk mengajukan protes diplomatik yang tenang sebagai gantinya. Malaysia juga telah membangun mekanisme yang dirancang untuk mencegah eskalasi, termasuk dengan sengaja mengerahkan satu kapal lebih sedikit daripada Beijing ketika kontak dilakukan. Malaysia juga terus membangun hubungan keamanannya dengan Beijing dengan meningkatkan konsultasi pertahanan dan langkah-langkah membangun kepercayaan.

Malaysia bermain aman di ranah ini karena beberapa alasan khusus keamanan. Pertama, kemampuan Malaysia masih sangat terbatas. RMN cukup kecil, dengan armada tua hanya 39 kapal permukaan dan dua kapal selam untuk menutupi perairan sekitar negara yang luas. Kedua, pelanggaran China hanyalah salah satu dari banyak ancaman tradisional dan nontradisional yang harus dihadapi Malaysia dalam domain maritimnya yang luas; lainnya termasuk pembajakan, penyelundupan, penculikan, terorisme, penangkapan ikan ilegal, dan perambahan dari negara tetangga seperti Indonesia dan Filipina.

d. Pendekatan Ekonomi. Komponen penting dan sering diremehkan dari pendekatan aman Malaysia adalah ekonomi. Beberapa cadangan minyak dan gas di Laut China Selatan yang paling produktif berada di luar negara bagian Sabah dan Sarawak, dan sektor minyak dan gas menyumbang sekitar sepertiga dari pendapatan pemerintah tahunan. Selain meningkatkan kemampuan militernya untuk melindungi instalasi minyak dan gasnya, Malaysia telah bekerja sama dengan perusahaan internasional dan menandatangani perjanjian dengan negara lain untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dari Laut China Selatan.

Malaysia juga telah bekerja untuk mengecilkan perbedaan dengan negara penuntut lainnya untuk mewujudkan manfaat ekonomi melalui perjanjian pembangunan bersama (*Joint Development Agreement /JDA*). Seperti di Laut China Selatan, pada Maret 2009 Malaysia dan Brunei berhasil menyelesaikan sengketa perbatasan laut dan darat mereka melalui Pertukaran Surat, dengan kedua belah pihak kemudian sepakat untuk bersama-sama mengembangkan sumber daya minyak dan gas di dua blok (CA1 dan CA2). Meskipun ada kesediaan Malaysia untuk mengesampingkan perselisihan demi pragmatisme ekonomi dengan semangat bermain aman, namun dengan China tidak ada rencana serupa yang sedang dikerjakan, karena hal itu akan melibatkan beberapa bentuk pengakuan atas Klaim China di Laut China Selatan, yang meluas ke ZEE

Malaysia. Pengakuan seperti itu akan bertentangan dengan kebijakan pemerintah saat ini.

#### **Upaya Mitigasi**

Malaysia menolak penggunaan ancaman dan kekerasan bersenjata untuk menyelesaikan konflik internasional dan mengadvokasi serta mempraktikkan penyelesaian sengketa secara damai. Kebijakan Pertahanan Nasional menggambarkan hal ini melalui penerapan strategi pertahanan berdasarkan diplomasi pertahanan bilateral dan multilateral yang dicapai melalui kerja sama regional dan internasional. Sejalan dengan filosofi ini, Malaysia mendukung penuh upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa dan masyarakat internasional dalam menjaga perdamaian dan keamanan universal untuk memastikan tatanan dunia sosial dan ekonomi yang adil.

Malaysia menganggap pembelaan kepentingan nasional sebagai hal mendasar bagi kedaulatan dan kemerdekaannya. Sejalan dengan itu, tujuan utama kebijakan Pertahanan Negara adalah untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan dan wilayah Malaysia dari ancaman dalam dan luar negeri. Kepentingan geografis Malaysia dibagi menjadi: (a) wilayah inti; (b) kepentingan ekonomi lepas pantai; dan (c) perairan dan wilayah udara strategis. Area inti meliputi daratan Malaysia di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak; perairan teritorial dan ruang udara di atasnya. Daerah-daerah ini harus sepenuhnya dilindungi dan dipertahankan dengan kemampuan terbaik Malaysia dari ancaman eksternal.

Wilayah ekonomi lepas pantai adalah ZEE negara dan landas kontinen. Daerah-daerah di Laut China Selatan ini kaya akan sumber daya perikanan dan hidrokarbon yang telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian negara. Jalur komunikasi maritim dan ruang udara strategis Malaysia adalah sebagai berikut: (a) Jalur komunikasi maritim dan ruang udara yang menghubungkan Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak; (b) Selat Malaka dan Pendekatannya; dan (c) Selat Singapura dan pendekatannya. Dalam hal ini, Malaysia harus memiliki kemampuan pertahanan untuk memastikan bahwa wilayah utamanya yang didasarkan pada kepentingan nasional dipertahankan dengan segala cara yang mungkin. Mempertahankan dan meningkatkan kemampuannya untuk mempertahankan kedaulatannya atas wilayah terestrial dan maritimnya termasuk ZEE, landas kontinen, dan semua jalur komunikasi dan ruang udara strategis laut. Dengan demikian pengembangan Angkatan Tentara Malaysia harus berdasarkan pada pertahanan ketiga wilayah tersebut untuk menjamin kedaulatan dan kemerdekaan yang menyediakan katalis bagi program-program pembangunan nasional.

Untuk mengurangi risiko dan memaksimalkan peluang yang timbul dari perilaku kekuatan besar China, Malaysia menerapkan strategi lindung nilai.

Dari 2018 hingga 2020, kekuatan menengah Malaysia menerapkan keterlibatan langsung dan elemen penyeimbangan terbatas dan *bandwagoning* terbatas secara fleksibel namun konsisten. Baik *Belt and Road Initiative* (BRI) China maupun tindakannya di Laut China Selatan tidak menyebabkan perubahan besar dalam strategi lindung nilai Malaysia. Malaysia juga berusaha memelihara hubungan persahabatan dengan semua negara dan mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan hukum internasional. Laut China Selatan harus menjadi *platform* kerjasama dan konektivitas, bukan area konfrontasi atau konflik, yang sejalan dengan semangat *Zone of Peace, Freedom and Neutrality* (ZOPFAN). Kerja sama ini sangat penting untuk menjamin kebebasan navigasi dan penerbangan sebagaimana diatur oleh hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS). Malaysia bersikeras pada penggunaan diplomasi dan hukum internasional untuk mengelola perselisihan.

#### 4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bagi Malaysia yang terpenting adalah kebijakan terhadap China dapat tertanam dalam hubungan multilateral (segala arah), bersahabat, dan seimbang dengan Amerika Serikat, Jepang, dan ASEAN. Konsep pendekatan pragmatis (lindung nilai) yang diperbarui sebagai inovasi penting, menambahkan komponen khusus untuk menilai persepsi para pemimpin politik tentang risiko dan peluang yang terkait dengan target lindung nilai serta nilai strategis dari mitra penyeimbang potensial. Bagi Malaysia Laut China Selatan harus menjadi *platform* kerjasama dan konektivitas, bukan area konfrontasi atau konflik, yang sejalan dengan semangat *Zone of Peace, Freedom and Neutrality* (ZOPFAN), dan bersikeras pada penggunaan diplomasi dan hukum internasional untuk mengelola perselisihan.

Sebagai upaya mitigasi, maka (1) Malaysia tetap memelihara hubungan baiknya dengan China untuk kemakmuran ekonomi di atas kepentingan lain, termasuk sengketa kedaulatan kedua negara; 2) Malaysia tetap melanjutkan hubungan militer yang kuat dengan AS untuk mengimbangi China, mengingat kehadirannya semakin meningkat di Asia Tenggara; dan (3) Malaysia berupaya menggaungkan hubungan bilateral yang kuat dengan AS dan China, termasuk mendorong penyelesaian sengketa Laut China Selatan secara multilateral melalui ASEAN.

#### 5. REFERENSI:

- Ahmad, R. (2019a). *New ideas and reforms in protecting nation's interests, dalam* <https://www.nst.com.my/opinion/columnists/2019/12/544108/new-ideas-and-reforms-protecting-nations-interests>, diakses pada tanggal 7 Juli 2021.
- Ahmad, R. (2019b, December 2). *New ideas and reforms in protecting nation's interests.*

<https://www.nst.com.my/opinion/columnists/2019/12/544108/new-ideas-and-reforms-protecting-nations-interests>, diakses pada tanggal 7 Juli 2021.

- Ayson, R. (2007). Regional Stability in the Asia-Pacific: Towards a Conceptual Understanding. *Asian Security, 1*, 190–213.
- Breslin, S. (2010). *Regions and Regionalism in World Politics*. New York: Palgrave MacMillan.
- Buzan, B., & Waeber, O. (2009). *Regions and Powers, The Structure of International Security*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Darmawan, A. B., & Mahendra, Lady. (2018). Isu Laut Tiongkok Selatan: Negara-negara ASEAN Terbelah Menghadapi Tiongkok. *Jurnal Global & Strategis, 12*(1), 79–100.
- Finkbeiner, J. M. (2013). *Malaysia's Great Power Balance and the South China Sea Disputes*. U.S. Army War College.
- Frazier, D., & Stewart-Ingersoll, R. (2010). Regional powers and security: A framework for understanding order within regional security complexes. *European Journal of International Relations*.
- Manurung, H. (2017). South China Sea Territorial Dispute: A Lesson for Association of South East Asian Nations (ASEAN). *SSRN Electronic Journal, January 2017*.
- Muller, J. (2021). *Production of liquefied natural gas (LNG) in Malaysia from 2013 to 2020, dalam* <https://www.statista.com/statistics/719073/liquefied-natural-gas-production-malaysia>, diakses pada tanggal 7 Juli 2021.
- Parameswaran, P. (2015). Playing It Safe : Malaysia 's Approach to the South China Sea and Implications for the United States. *Maritime Strategy Series, February*, 1–14.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup (ed.); Cet. 1). Literasi Media Publishing.
- Storey, I. (2020). Malaysia and the South China Sea Dispute: Policy Continuity amid Domestic Political Change. *ISEAS Yusof Ishak Institute, 18*(2020), 1–10.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Sutopo (ed.); Cet. Ke-19). Penerbit Alfabeta.
- The Straits Times. (2017). *Beijing's nine-dash line "not recognised by KL", dalam* <https://www.straitstimes.com/asia/beijings-nine-dash-line-not-recognised-by-kl>, diakses pada tanggal 7 Juli 2021.
- Yuanzhi, L. (2020, August 2). *Does Malaysia want to rock the boat in the South China Sea? - Global Times.* <https://www.globaltimes.cn/content/1196456.shtml>, diakses pada tanggal 6 Juli 2021.